

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Oleh: Gillang Medato Analki

NPM 2163201061

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
(PKH) DI KECAMATAN SELEBAR
KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Administrasi Publik (S1) dan mencapai gelar

Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Oleh: **Gillang Medato Analki**

NPM 2163201061

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

2025

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan atas segala nikmat dan kemudahan sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Segala syukur atas karunia-Mu menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disetiap proses perjalanan. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang sangat kukasihi dan kusayangi:

1. Jika bukan karna Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah. Terimakasih ya Allah engkau selalu disisiku.
2. Teruntuk surgaku dan duniaku, kepada orang tuaku Ayah Amir Syarifudin dan Ibu Elvis Varia selama ini yang berjuang untukku yang tidak pernah henti dalam sholat mu selalu berdoa untuk keberhasilan anak laki lakimu yang lemah ini,tanpa doa mu Ayah dan Ibu, mungkin tidak akan bisa sampai di titik ini. Terimakasih ya bu yang selalu berdoa disetiap langkah ku untuk mencapai keberhasilan, dan untuk ayahku terimakasih sudah memberikan banyak hal tentang kehidupan atau pembelajaran sebagai laki laki yang harus selalu bekerja keras dalam menghidupi dan melindungi keluarga. Terimakasih Ayah Amir Syarifudin dan Ibu Elvis Varia “Gelar Sarjana Ini Untuk Kalian Berdua”
3. Hai adik bungsku Amelza Mitahul Jannah, makasih ya dek yang selalu memberikan semangat disetiap langkah apapun keputusan yang abangmu ambil selalu *support*, termasuk selalu memberikan motivasi hingga bisa ketahap ini.
4. Kepada seseorang perempuan yang tak kalah penting kehadirannya “RY”, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah saya mulai dari 2023 sampai 2025 sekarang. Terimakasih sudah menjadi pendamping dalam segala hal menemani, mendukung, menghibur, memberikan semangat pantang menyerah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam perjalanan yang kita lalui, dan saya juga berharap kepada Allah hal-hal baik selalu datang disetiap waktunya.
5. Kepada dosen pembimbing saya Ibu Dr. Titi Darmi, M.Si terimakasih atas bimbingannya selama ini mulai dari awal hingga skripsi ini selesai dibuat.
6. Teman seperjuangan Prodi Administrasi Publik Tahun 2021 yang sama-sama berproses dari awal sampai akhir perkuliahan.
7. Kepada diri sendiri, Gillang Medato Analki yang mau dan mampu berusaha, berjuang serta tidak pantang menyerah untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas kerja kerasnya hingga sampai dititik ini. Proud Of Me!

MOTTO

“Jangan menghitung berapa kali orang menyakitimu, tapi hitunglah berapa kali kau menyakiti tuhanmu, tapi tuhanmu tak pernah meninggalkanmu”
-Ullil 2024

“Tidak ada mimpi yang gagal,yang ada hanyalah mimpi yang tertunda,cuma sekiranya kalian merasa gagal mencapai mimpi,jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan”
-Windah basudara

“Tiada hidup tanpa masalah, Tiada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetap semangat hingga Bismillah menjadi Alhamdulillah”
-Wans86_Clipper

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gillang Medato Analki

NPM : 2163201061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kerja ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu” Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Bengkulu, 18 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Gillang Medato Analki
NPM 2163201061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Selasa, 15 Juli 2025

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Titi Darmi, M.Si
NIDN. 0218096801

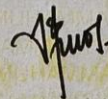
PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

Hari/tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Jam : 08.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

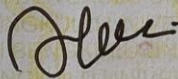
Tim Penguji

Ketua



Novliza Eka Patrisia, M.Si
NIDN. 0209118701

Anggota 1



Dr. Sri Indarti, M.Si
NIDN. 0219017102

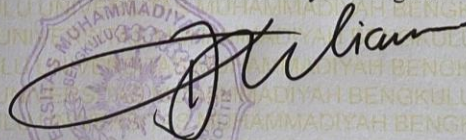
Anggota 2



Dr. Titi Darmi, M.Si
NIDN. 0218096801

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Juliana Kurniawati, M.Si
NP. 197807042010082095

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Oleh: Gillang Medato Analki
Dosen Pembimbing: Dr. Titi Darmi, M.Si

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi angka kemiskinan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Diketahui bahwa dalam pelaksanaannya, program ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indikator Komunikasi antara pendamping dan peserta PKH cukup efektif melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), namun belum merata. (2) Indikator Sumber daya secara umum program ini telah didukung oleh sumber daya yang memadai. (3) Indikator Disposisi atau kemauan pelaksana dalam menjalankan program sudah cukup baik meskipun masih terdapat kendala teknis. (4) Indikator Struktur Birokrasi berjalan dengan mengacu pada SOP, namun perlu ditingkatkan koordinasinya antarunit pelaksana. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan akurasi data penerima, penguatan sosialisasi, dan evaluasi berkala agar implementasi PKH semakin tepat sasaran dan berkelanjutan.

Kata kunci: Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Implementasi Kebijakan.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) POLICY IN SELEBAR SUBDISTRICT, BENGKULU CITY

By:

Gillang Medato Analki

2163201061

The Family Hope Program (PKH) is a form of conditional social assistance aimed at improving the quality of human resources and reducing poverty rates. This study was conducted to analyze the implementation of the PKH policy in Selebar Subdistrict, Bengkulu City. It was found that in its implementation, the program still faces various challenges, such as mistargeted beneficiaries and a lack of public understanding regarding the program's objectives.

This research employed a qualitative approach with a descriptive method, utilizing interview, observation, and documentation techniques.

The research findings indicate that: (1) the communication indicator between facilitators and PKH participants is relatively effective through Family Capacity Improvement Meetings (P2K2), although its implementation is not yet evenly distributed; (2) the resource indicator shows that the program is generally supported by adequate resources; (3) the disposition indicator, referring to the willingness of implementers to carry out the program, is fairly good despite several technical obstacles; and (4) the bureaucratic structure indicator operates based on Standard Operating Procedures (SOP), although coordination among implementing units still needs improvement. This study suggests the importance of improving the accuracy of beneficiary data, strengthening public outreach, and conducting regular evaluations to ensure that PKH implementation becomes more targeted and sustainable.

Keywords: Family Hope Program, Poverty, Policy Implementation

RINGKASAN

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu; Gillang Medato Analki, 2163201061, 2025, 111 halaman; Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program bantuan sosial sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH merupakan program bantuan tunai bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program ini menyasar keluarga miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria kepesertaan.

Pelaksanaan PKH telah menunjukkan perkembangan yang signifikan sejak diluncurkan tahun 2007, baik dari segi jumlah penerima manfaat (KPM) maupun anggaran yang dialokasikan. Di Kota Bengkulu sendiri, jumlah KPM PKH pada tahun 2023 mencapai 13.998 keluarga dengan anggaran sebesar lebih dari 17 miliar rupiah. Meskipun begitu, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal ketepatan sasaran. Masih ditemukan penerima bantuan yang secara ekonomi tergolong mampu, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Permasalahan lainnya adalah potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan dan efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dengan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi

kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi berjudul : “Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi saya mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Titi Darmi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi serta Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan banyak kontribusi dan telah meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr Juliana Kurniawati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Tim penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini baik saat sidang skripsi maupun saat revisi skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Bengkulu, 18 Juli 2025



Gillang Medato Analki
NPM : 2163201061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
RINGKASAN.....	x
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB I TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Konsep Kebijakan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Konsep Implementasi Kebijakan.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Konsep Kesejahteraan Sosial	Error! Bookmark not defined.
2.2.4 Konsep Program Keluarga Harapan (PKH).....	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Berpikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
3.5 Penentuan Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
3.7 Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
3.8 Analisis Data	Error! Bookmark not defined.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**Error! Bookmark not defined.**

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bengkulu	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.1 Letak Geografis	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.2 Sejarah Kota Bengkulu	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.3 Visi dan Misi Kota Bengkulu	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.4 Keadaan Pemerintahan	Error! Bookmark not defined.
4.1.1.5 Keadaan Penduduk	Error! Bookmark not defined.
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bengkulu	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.1 Sejarah Dinas Sosial....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.2 Visi-Misi Dinas Sosial.	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.3 Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Karakteristik Informan	Error! Bookmark not defined.
4.3 Hasil Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.1 Komunikasi	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.2 Sumber Daya.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.3 Disposisi.....	Error! Bookmark not defined.
4.3.1.4 Struktur Birokrasi.....	Error! Bookmark not defined.

4.4 Pembahasan dan Analisis Teori.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1 Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.1 Komunikasi	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.2 Sumber Daya.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.3 Disposisi.....	Error! Bookmark not defined.
4.4.1.4 Struktur Birokrasi.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
5.1 Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2 Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Di Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Jumlah KPM PKH dan Dana Anggaran di Kota Bengkulu	4
Tabel 1.3 Data jumlah penduduk Kota Bengkulu dan jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu (ribu jiwa).....	8
Tabel 3.1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4.1 Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu pada tahun 2021.....	39
Tabel 4.2 Persebaran Unit Kerja di Pemerintah Kota Bengkulu.....	41
Tabel 4.3 Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Pada Tahun 2021.....	42
Tabel 4.4 Karakteristik Informan.....	57
Tabel 4.5 Jumlah KPM PKH dan Jumlah Pendamping di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Tentang Analisis Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Bengkulu.....	26
Gambar 4.1 Jenis Layanan Dinas Sosial Kota Bengkulu.....	45
Gambar 4.2 Sosialisasi Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Penyebab kemiskinan bisa berupa keterbatasan sumber daya atau sulitnya akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut Suryawati (2005), kemiskinan ialah kondisi di mana seseorang kekurangan hal-hal penting yang biasanya dimiliki, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air bersih, yang sangat terkait dengan kualitas hidup. Selain itu, kemiskinan juga bisa berarti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengentaskan masalah kemiskinan dan memberikan kehormatan yang layak sebagai warga negara (Rosalina, 2018)

Kemiskinan merupakan masalah global yang juga terjadi di Indonesia. Menurut Munkner dan Walter (2001), kemiskinan memiliki berbagai faktor penyebab dan dimensi yang berbeda, tergantung pada apakah masyarakat miskin tinggal di pedesaan atau perkotaan, serta struktur keluarga mereka, baik keluarga kecil, keluarga inti, atau hidup sendiri. Beberapa pandangan mengenai penyebab kemiskinan yaitu: pertama, kekurangan sumber daya dan ketentuan perdagangan yang merugikan, sehingga solusi yang tepat adalah meningkatkan produktivitas, akses pasar, dan harga adil bagi produk masyarakat miskin. Kedua, kondisi lingkungan alam yang buruk, yang dapat diatasi dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana. Ketiga, rendahnya pengetahuan serta akses informasi, pendidikan, dan pelatihan, sehingga pengembangan sumber daya manusia diperlukan untuk mengatasi kemiskinan (Adawiyah, 2020)

Langkah pemerintah dalam mengatasi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya adalah melalui pemberian bantuan sosial. Berikut adalah beberapa program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin yaitu: Program Raskin (Beras untuk keluarga miskin) Tahun 2000, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial

Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Program Sembako, ATENSI untuk lansia dan penyandang disabilitas, Pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Beras, Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP). Bantuan sosial (bansos) dapat berupa uang tunai, barang, atau layanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, atau memberikan bantuan dalam situasi darurat (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2018)

Berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia pada akhirnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan beban bagi penduduk miskin. Salah satu dari beberapa program tersebut adalah melalui program bantuan sosial yang ditujukan untuk masyarakat miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 1 tentang penanganan fakir miskin.

Program ini diperkenalkan oleh Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yang merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang sosial. Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial terhadap warga miskin di Indonesia. Pada tahun 2007, PKH diluncurkan awalnya sebagai uji coba di tujuh provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, Gorontalo, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sejak 2007 juga KPM PKH meningkat secara bertahap sampai dengan tahun 2020, PKH telah dilaksanakan di 34 Provinsi yang mencakup 514 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan (Sompie, 2022)

Tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Dengan bantuan sistem DTKS, Kemensos dapat lebih mudah mengalokasikan berbagai jenis bantuan sosial kepada kelompok rentan bagi pemerintah dan Kemensos. Namun, proses pengentasan

kemiskinan melalui PKH tidaklah mudah, melainkan membutuhkan kemauan politik yang baik, baik dari pemerintah (sebagai faktor pendukung) maupun dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kompleksitas masalah kemiskinan perlu diatasi secara komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, dan mempromosikannya secara terkoordinasi.

PKH sendiri telah diatur dalam Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 pasal 32, yang terdiri atas: perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH, penyaluran Bantuan Sosial PKH, pendampingan PKH, peningkatan Kemampuan Keluarga, verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH, Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH dan Transformasi Kepesertaan PKH.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan kelanjutan program subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Program Keluarga Harapan lebih dimaksudkan sebagai sebuah program bantuan tunai bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin (KM) dengan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan, meningkatkan kualitas serta kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini melalui perubahan perilaku terkait pendidikan dan kesehatan, serta mendukung tercapainya kesejahteraan sosial (Murah, 2016)

Tabel 1.1 Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Indonesia

No	Tahun	Jumlah KPM PKH	Jumlah Anggaran
1	2016	5.981.528 KPM	10 triliun
2	2017	6.228.810 KPM	11,5 triliun
3	2019	9.841.270 KPM	34,2 triliun
4	2020	10.000.000 KPM	36,9 triliun

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Berdasarkan tabel 1.1 jumlah KPM PKH tahun 2016 adalah sebanyak 5.981.528 KPM dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun. Pada tahun 2017, KPM PKH meningkat menjadi 6.228.810 KPM dengan anggaran bantuan sebesar Rp 11.5 triliun. Kemudian anggaran sebesar Rp 19.4 triliun. Pada tahun 2019, terjadi penurunan KPM PKH menjadi 9.841.270 KPM dengan anggaran sebesar Rp 34.2 triliun. Pada tahun 2020, KPM PKH sebanyak 10.000.000 KPM dengan anggaran Rp 36.9 triliun. Jumlah KPM PKH dari tahun 2007 sampai 2020 sebanyak 36.991.552 KPM yang tersebar di seluruh Indonesia(Sompie, 2022)

Tabel 1.2 Jumlah KPM PKH dan Dana Anggaran di Kota Bengkulu

No	Tahun	Jumlah KPM PKH	Dana Anggaran
1	2023	13.998	17.536.807.300
2	2024	13.950	17.392.807.293

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu

Berdasarkan tabel 1.2 pada tahun 2023 jumlah KPM PKH berjumlah 13.998 dengan dana anggaran yang keluar berjumlah 17.536.807.300 dan pada tahun 2024 jumlah KPM PKH berjumlah 13.950 dengan dana anggaran yang keluar berjumlah 17.392.807.293. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2023 ke tahun 2024 KPM PKH mengalami sedikit penurunan, hal itu dapat kita simpulkan bahwa bantuan PKH ini telah sedikit membantu meningkatkan kemiskinan terutama di Kota Bengkulu ini.

Imbalan dari yang telah didapatkan oleh KPM maka keluarga miskin (KM) diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. UPPKH adalah unit pengelola PKH yang dibentuk baik dipusat maupun di daerah. Di pusat adalah UPPKH pusat dan di daerah adalah UPPKH Kabupaten/Kota.

Pendamping PKH adalah pekerja sosial yang direkrut oleh UPPKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendampingan RSTM yang penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH. Penyelenggaraan PKH bersifat multisektor baik dipusat maupun di daerah yang melibatkan instansi

pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga Desa serta masyarakat. Sanksi bagi pendamping yang dampingannya tidak memenuhi kondisionalitas akan diberikan sanksi dapat berupa :

- 1) Teguran secara lisan maupun tertulis,
- 2) Penundaan pembayaran honorarium,
- 3) Penghentian kontrak kerja

Pendampingan yang dilakukan oleh peserta PKH yaitu:

1. Pendampingan komponen kesehatan dan pendidikan, dilakukan dengan ketentuan berikut :

- a. Pendamping PKH berkewajiban mengadakan pertemuan kelompok bulanan dengan peserta PKH dampingannya.
- b. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen kesehatan dan pendidikan sampai dengan tepat sasaran.

2. Pendampingan komponen kesejahteraan sosial untuk lansia dan penyandang distabilitas berat (PDB), dilakukan dengan ketentuan berikut :

- a. Pendampingan komponen lansia dilaksanakan oleh Pendamping Lansia Direktorat Rehabilitas Sosial Lanjut Usia.
- b. Pendampingan Penyandang Distabilitas Berat (PDB) dilaksanakan oleh pendamping Penyandang Distabilitas Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Distabilitas.
- c. Pendamping PKH berkewajiban memastikan bantuan komponen lansia dan Penyandang Disabilitas Berat (PDB) sampai kepada sasaran.

Program yang telah berjalan sejak tahun 2007 ini tentunya mengalami berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Program perlindungan sosial ini, yang juga dikenal secara internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT), terbukti cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan, terutama masalah kemiskinan kronis yang dihadapi oleh beberapa negara. Sasaran utama PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dengan beberapa komponen. Komponen kesehatan mencakup ibu hamil atau menyusui, serta anak-anak berusia nol hingga enam tahun.

Komponen pendidikan mencakup anak-anak yang bersekolah di SD/MI atau sederajat, SMP/MTs atau sederajat, SMK/MA atau sederajat, serta anak-anak berusia enam hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2016, PKH juga menambahkan komponen kesejahteraan sosial, yang mencakup lansia berusia 60 tahun ke atas, serta penyandang disabilitas berat (A. Prichatin., 2019)

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan, yang menjadi prioritas utama. Berbagai strategi, kebijakan, serta program penanggulangan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah diterapkan. Namun, hasilnya belum sepenuhnya optimal, yang terlihat dari masih banyaknya penduduk miskin di Kota Bengkulu. Mengatasi kemiskinan bukanlah hal yang mudah, karena kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Multidimensional berarti suatu keadaan di mana sebuah negara menghadapi berbagai konflik dan tantangan, baik besar maupun kecil, dalam bidang politik, sosial, ekonomi, serta krisis moral.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi kriteria kepesertaan dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos RI, 2015: 2). Sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu. Peserta PKH diwajibkan untuk terdaftar dan memanfaatkan layanan kesehatan dan pendidikan terdekat. Dalam bidang kesehatan, kewajiban peserta meliputi pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil, pemberian gizi, imunisasi, serta penimbangan berat badan anak balita. Sementara di bidang pendidikan, peserta harus mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarganya di sekolah dasar dan menengah. Untuk anggota keluarga penyandang disabilitas, kewajibannya disesuaikan dengan kondisi disabilitas mereka (Kemensos RI, 2015: 12).

PKH bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari kemiskinan. PKH juga mendukung

pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Program ini dikenal sebagai Program Bantuan Tunai Bersyarat. Persyaratan tersebut berupa kehadiran di fasilitas pendidikan (anak usia sekolah) maupun kehadiran di fasilitas kesehatan (Anak Balita dan Ibu hamil). Tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu 1 orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam 1 rumah tangga.

Pada tahun 2014, Provinsi Bengkulu pertama kali menerapkan program pengentasan kemiskinan berupa Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH sangat berpengaruh dalam mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu terutama di Kota Bengkulu, dengan PKH juga angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu lebih stabil dari waktu tahun ke tahun. KPM PKH Provinsi Bengkulu tersebar di 10 Kabupaten/Kota, 128 Kecamatan, dan 1.513 Kelurahan/Desa(Sompie, 2022)

Jumlah KPM PKH di Provinsi Bengkulu mulai tahun 2016 naik secara signifikan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu mencapai angka 91.062 KPM. Namun tidak semua masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu belum tentu mendapatkan PKH. Pada tahun 2020 berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu jumlah masyarakat miskin di Provinsi Bengkulu yaitu 302.580 jiwa namun yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sebanyak 80.950 KPM saja. Anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Provinsi Bengkulu naik signifikan pada tahun 2019.

Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Bengkulu dan jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu pada 2 tahun terakhir yang dilampirkan pada tabel dibawah ini yaitu:

Tabel 1.3 Data jumlah penduduk Kota Bengkulu dan jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu (ribu jiwa)

No	Tahun	jumlah penduduk Kota Bengkulu	jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu (ribu jiwa)
1.	2022	384.800	59,43
2.	2023	394.192	56,10

Sumber: <https://bengkulu.bps.go.id>, 2023

Berdasarkan tabel 1.3 data yang telah peneliti temukan yaitu, jumlah penduduk Kota Bengkulu pada tahun 2022 dengan total 384.800 penduduk dan pada tahun 2023 dengan total 394.192 penduduk. Jumlah penduduk miskin di Kota Bengkulu pada tahun ada 5.943 peserta, dan pada tahun 2023 ada 5.610 peserta. Dari data tersebut, diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Bengkulu dan penduduk miskin di Kota Bengkulu hanya sekitar 15% jumlah penduduk miskin yg ada di Kota Bengkulu, namun di dalam jumlah penduduk miskin itu pada 2 tahun terakhir ada peningkatan yaitu menurunnya sedikit jumlah anggota penduduk miskin sejak dibuatnya program bantuin PKH untuk masyarakat miskin.

Sasaran PKH yaitu keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Bentuk bantuan sosial yang diberikan PKH adalah dalam bentuk uang nontunai yang diberikan kepada seseorang, keluarga, atau masyarakat miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang dapat dicairkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau buku tabungan.

Berdasarkan observasi awal, menunjukkan masih banyak kendala-kendala dalam melaksanakan program bantuan PKH terutama di Kota Bengkulu ini. Ditemukan bahwa sasaran program PKH ini masih banyak yang belum tepat

sasarannya, dengan indikator seperti masyarakat yang ekonominya cukup dan masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua (motor) dan kendaraan roda empat (mobil). Seharusnya mereka yang seperti kriteria tersebut tidak layak untuk mendapatkan bantuan PKH ini, karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan dan lebih layak mendapatkan daripada mereka. Hal ini bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi “Bantuan sosial hanya diberikan kepada orang atau keluarga yang tergolong fakir miskin”.

Selain kendala tersebut, ada hal yang juga diperhatikan pada program ini. Apakah program bantuan PKH yang diberikan pemerintah tersebut berdambak baik kepada masyarakat dengan membuat ekonomi mereka semakin membaik dan dapat membuat usaha sendiri untuk kehidupan kedepannya atau malah membuat masyarakat menjadi ketergantungan akan bantuan tersebut.

Peneliti memilih Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup tinggi di Kota Bengkulu. Berdasarkan observasi awal, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program PKH di Kecamatan Selebar, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban sebagai peserta PKH. Selain itu, Kecamatan Selebar memiliki karakteristik sosial ekonomi yang beragam sehingga menjadi wilayah yang relevan untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi kebijakan PKH dilakukan dan sejauh mana program ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian di kecamatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas kebijakan bantuan sosial di tingkat lokal serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif bagi pelaksanaan program di lapangan.

Dengan memahami secara menyeluruh kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kota Bengkulu mengenai program bantuan PKH, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui identifikasi

dan analisis kendala-kendala yang ditemui, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi guna meningkatkan evaluasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Didasari oleh permasalahan yang muncul, maka penulis merasa tertarik untuk menjalankan penelitian skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah penelitian yang ditulis oleh peneliti, yaitu menganalisis bagaimana implementasi kebijakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah sesuatu yang harus dicapai dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah menganalisis implementasi kebijakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Praktis dan Teoritis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Bengkulu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dalam bidang ilmu administrasi publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial, serta dapat menjadi dasar atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.